

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN
INTERN AKUNTANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada SKPD di Kota Mataram)**

Prayitno Basuki¹⁾, Endar Pituringsih²⁾, Ahmad Rifa'i³⁾

^{1,2,3)}Universitas Mataram

E-mail: endar07ringsih@yahoo.co.id

Abstract,

The purpose of this study are : 1) to examine the effect of human resources capacity to timeliness of financial reporting, 2) to examine the effect of internal control in accounting to timeliness of financial reporting, and 3) to examine the effect of information technology utilization to timeliness of financial reporting. Population of this study is Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) on Local Government in Mataram totaled 36 SKPD consisting of the Department, Board, Office, and Inspectorat. Respondents in this study is the official financial administration and accounting staff who make the financial reporting on SKPD, which amounted to 72 (36 SKPD x 2), and of these, questionnaires were returned and can be processed by 60 questionnaire. Inferential statistical analysis techniques used are multiple regression analysis techniques, by F-test and t-test. The result showed that : human resources capacity (X1) effects to timeliness of financial reporting (Y) (studies on SKPD in Mataram), internal control in accounting (X2) does not affect to timeliness of financial reporting (Y) (studies on SKPD in Mataram), and information technology utilization (X3) affects to timeliness of financial reporting (Y) (studies on SKPD in Mataram).

Keywords : Timeliness of financial Reporting, Human Resources Capacity, Internal Control in Accounting, Information Technology Utilization

PENDAHULUAN

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik misalnya, pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009:20).

Dalam pelaporan keuangan Pemerintah diperlukan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan laporan keuangan kualitas terbaik. Fakta bahwa laporan keuangan pemerintah belum seluruhnya memenuhi keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Beberapa dari hasil penelitian mengemukakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Winidyaningrum, 2009). karena sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan kemampuan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Dengan adanya sumber daya manusia kompeten yang didukung dengan pendidikan dan pengalamannya maka sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Indriasari dan Nahartoyo (2008), yang memberikan bukti secara empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Sementara penelitian Rosmawati (2011), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan pendapat yang menyatakan bahwa sumber daya manusia sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena yang terjadi di pemerintah daerah khususnya kota mataram, kapasitas sumber daya manusia masih merupakan masalah penting yang mempengaruhi keandalan dan

ketepatanwaktuan laporan keuangan. Dari fakta empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota mataram, masih terdapat penempatan aparatur dalam bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun kompetensi teknis yang harus dimiliki, misal, bagian keuangan yang membuat laporan keuangan dimana aparat yang ditempatkan di bagian tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi. Selain itu, tingkat pengetahuan akuntansi dari aparatur yang ditempatkan di bagian keuangan atau akuntansi, masih minim. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan maupun ketepatanwaktuan pelaporan yang harus dipenuhi.

Fenomena lainnya adalah belum meratanya alokasi aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi di lingkungan pemerintah kota mataram. Hal ini ditandai dari masih adanya pengelola keuangan di SKPD yang tidak memiliki aparat yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson *et al.* 2000:93). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang di tawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan menyiapkan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang dipandang perlu mengingat volume transaksi keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kuantitas dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Hal tersebut didukung oleh penelitian Andriani (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan Pemda. Indriasari dan Nahartoyo (2008), memberikan bukti secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Riasetiawan, 2010). Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007:75).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta di patuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern yang memadai akan menghasilkan Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007: 76): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Pengendalian intern yang dimiliki oleh Pemerintah kota Mataram belum memadai, hal ini tercermin dari adanya temuan BPK RI atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram pada semester I Tahun 2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan waktu penelitian yang memiliki perbedaan karakteristik wilayah dan budaya. Penelitian ini mencoba memberikan masukan berupa pentingnya kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian akuntansi bagi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibangun suatu rumusan masalah yaitu Apakah terdapat pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Berdasarkan rumusan masalah yang dibangun, penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dan seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000:94). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika di tinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tepat menjaga volume. Sedangkan, pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah di bandingkan dengan metode pengolahan yang lain.

Penggunaan komputer dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang di tambah atau di kurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakuratan data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya, hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi sering kali mengubah karakter aktivitas.

Pengendalian Internal Akuntansi

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang di maksudkan dalam peraturan ini meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah di tetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mendukung pengawasan intern pemerintah daerah dilakukan oleh beberapa institusi antara lain, BPKP (badan pengawas keuangan dan pembangunan) yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Berikutnya inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Sementara itu, institusi pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

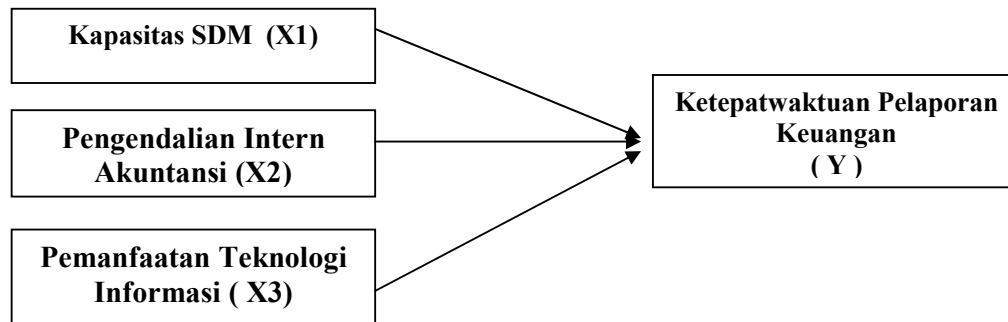
Dengan demikian, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, dimana variabel analisisnya yaitu, kapasitas SDM (X1), Pengendalian intern akuntansi (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan sedangkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Kerangka Konseptual penelitian



2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H₃: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Mataram jumlah Satuan Kerja yang ada berjumlah 36 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Inspektorat. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi pembuat laporan keuangan pada SKPD. Dengan demikian maka jumlah responden 36 SKPD x 2 orang = 72 Responden.

Dari jumlah keseluruhan penyebaran kuesioner tersebut, maka kuesioner yang kembali adalah sebanyak 60 kuesioner. Dengan demikian, maka tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebanyak 83.33% (60/72x100%). Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi pembuat laporan keuangan pada SKPD	72
2	Kuesioner yang tidak kembali	12
3	Kuesioner yang kembali	60
4	Tingkat pengembalian (<i>responserate</i>) (60/72 X 100%)	83.33%

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model skala *likert* lima poin, yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat setuju. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel eksogen (*independent*) yang terdiri dari kapasitas SDM (X1), pengendalian internal akuntansi (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan 1 (satu) variabel endogen (*dependent*) yaitu ketepatanwaktuan (Y). Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	Indikator Reflektif terdiri dari:	
	Kapasitas staf (X1.1)	Interval
	Tupoksi (X1.2)	Interval
	Pengembangan (X1.3)	Interval
Pengendalian Intern akuntansi (X2)	Indikator Formatif terdiri dari:	
	Lingkungan pengendalian (X2.1)	Interval
	Penilaian risiko (X1.2)	Interval
	Kegiatan pengendalian (X2.3)	Interval
	Informasi dan komunikasi (X2.4)	Interval
	Pemantauan pengendalian intern(X2.5)	Interval
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	Indikator Reflektif terdiri dari:	
	Perangkat (X3.1)	Interval
	Pengelolaan Data Keuangan (X3.2)	Interval
	Perawatan (X3.3)	Interval
Ketepatanwaktuan (Y)	Indikator Reflektif terdiri dari:	
	<i>Timelines</i> (Y2.1)	Interval
	<i>Sistematis waktu</i> (Y2.2)	Interval
	<i>Sistematis unsur</i> (Y2.3)	Interval

Metode Analisa Data

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008:116) menyatakan bahwa metode analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan interpretasikan. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis statistik inferensial yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan maksud untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini (Sekaran, 2003:102). Selanjutnya Rumus regresi yang digunakan dalam analisis ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- β_{1-3} = Koefisien regresi X_1, X_2, X_3
- X_1 = Kapasitas SDM
- X_2 = Pengendalian intern Akuntansi
- X_3 = Pemanfaatan teknologi Informasi
- Y = Ketepatanwaktuan pelaporan Keuangan
- e = faktor pengganggu

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mencakup pengujian terhadap pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan (uji F) dan parsial (uji t).

Kriteria uji F F tabel maka taraf nyata yang digunakan adalah sebesar 5%. Apabila F hitung > F tabel berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, namun tidak semua variabel terikat, namun tidak semua variabel terikat, artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selanjutnya kriteria uji t Apabila t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sementara itu, apabila t hitung < t tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.

PEMBAHASAN

Hasil uji secara parsial dengan menggunakan uji t maupun uji secara simultan (Uji F) dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3.
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Beta	T	Sig	Keterangan
Constant	0.745	3.221	0.002	-
SDM	0.359	2.277	0.027	Diterima
PIA	0.143	1.246	0.218	Ditolak
PTI	0.346	2.569	0.022	Diterima
α : 5% Adjusted R Square : 0.558 F hitung : 16.486 Sig F : 0.000				

Sumber : Data Primer diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 3 di atas akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM (X_1) yaitu berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y), ternyata hasil temuannya menunjukkan bahwa Kapasitas SDM (X_1) berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) pada tingkat signifikansi 0.027 ($P < 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya regresi (β_1) yaitu 0.359 dan t hitung sebesar 2.277 serta probabilitas sebesar 0.027 ($p < 0,05$).
2. Pengendalian Intern Akuntansi (X_2) yaitu: berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y), ternyata hasil temuannya menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi (X_2) tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) pada tingkat signifikansi 0.218 ($P > 0,05$), sehingga hipotesis ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan

besarnya regresi (β_2) yaitu 0.143 dan t hitung sebesar 1.246 serta probabilitas sebesar 0.218 ($p > 0,05$).

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) yaitu berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y), ternyata hasil temuannya menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y) pada tingkat signifikansi 0.022 ($P < 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya regresi (β_3) yaitu 0.346 dan t hitung sebesar 1.569 serta probabilitas sebesar 0,022 ($p < 0,05$).

Sementara itu, dari hasil uji secara simultan dengan menggunakan uji F pada Tabel 3 di atas diketahui nilai F hitung adalah sebesar 42.547 dengan angka probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga hipotesis yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan Kapasitas SDM (X1), Pengendalian Intern Akuntansi (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) secara simultan terhadap SKPD kota Mataram telah memenuhi kriteria diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang ditampilkan pada tabel 3 di atas maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$y = 2.045 + 0.359X1 + 0.143X2 + 0.346X3 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa kapasitas SDM, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada SKPD di Kota Mataram). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Begitu juga hasil analisis secara parsial dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa pada variabel kapasitas SDM, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada SKPD di Kota Mataram). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas SDM, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pemanfaatan teknologi informasi telah menunjukkan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan di wilayah SKPD kota Mataram. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan secara parsial masing-masing variabel terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi yaitu variabel Kapasitas SDM (X1) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y) (studi pada SKPD di Kota Mataram). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dan beta (β) sebesar 0.027. Artinya bahwa kapasitas SDM baik dilihat dari kapasitas staf, tupoksi, pengembangan pegawai dengan melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan keahlian hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hasil temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel Kapasitas SDM (X1) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jawaban responden sebagian besar adalah setuju dengan rata-rata skor nilai variabel Kapasitas SDM (X1) sebesar 4.46.

Selain itu, temuan dalam penelitian ini, didukung oleh penelitian Indriasari dan Nahartoyo (2008) dan Andriani (2010) yang memberikan bukti secara empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya Sembiring (2013) menemukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Begitu juga temuan Ariesta (2013), dan Roshanti *et al.* (2014) menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian Winidyaningrum (2009) menemukan hasil yang berbeda yaitu Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di pemerintah daerah khususnya kota Mataram, kapasitas sumber daya manusia masih merupakan masalah penting yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan. Dari fakta empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Mataram, masih terdapat penempatan aparatur dalam bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun kompetensi teknis

yang harus dimiliki. Selain itu, tingkat pengetahuan akuntansi dari aparatur yang ditempatkan di bagian keuangan atau akuntansi, masih minim.

Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi yaitu pengendalian intern akuntansi (X2) tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) (studi pada SKPD di Kota Mataram). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,000 ($p > 0,05$) dan beta (β) sebesar 0.218. Artinya bahwa pengendalian intern akuntansi di lingkup SKPD di Kota Mataram belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dari jawaban responden, masih ada responden yang menjawab sangat tidak setuju tentang pernyataan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah (X2.5). Selain itu juga masih ada responden yang menjawab sangat tidak setuju tentang laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub bagian keuangan/ akuntansi sebelum didistribusikan (X2.4). Jawaban dari responden tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian intern akuntansi yang mencakup Sistem dan prosedur akuntansi, Otorisasi, Formulir, dokumen dan catatan pemisahan tugas pada SKPD kota Mataram belum diterapkan dengan maksimal, sehingga hal tersebut akan berdampak pula terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Hasil temuan ini didukung dengan fenomena yang terjadi di Kota Mataram, bahwa hal ini tercermin dari adanya temuan BPK RI atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram pada semester I Tahun 2014. Dengan adanya fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Pengendalian intern yang dimiliki oleh Pemerintah kota Mataram belum memadai. Sehingga kondisi tersebut akan berdampak terhadap menurunnya tingkat kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan,

Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartoyo (2008), Ariesta (2013), Sembiring (2013), dan Roshanti *et al.* (2014) dimana hasil temuannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Berbagai kondisi dan temuan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pengendalian intern akuntansi di SKPD kota Mataram masih perlu ditingkatkan, baik dari Sistem dan prosedur akuntansi, Otorisasi, Formulir, dokumen dan catatan pemisahan tugas sehingga pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) (Studi pada SKPD di Kota Mataram). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dan beta (β) sebesar 0.022. Artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup: perangkat dan pengelolaan data keuangan mempunyai dampak terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan kata lain pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam penyajian laporan keuangan.

Hasil temuan dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dengan rata rata skor nilai variabel pemanfaatan teknologi informasi, yang mencakup: perangkat, pengelolaan data keuangan, dan perawatan pada SKPD kota Mataram adalah sebesar (X3) sebesar 3.94. Hasil temuan ini juga didukung oleh penelitian Andriani (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan Pemda. Indriasari dan Nahartoyo (2008), memberikan bukti secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan pemanfaatan teknologi informasi yang ada, dengan didukung sumber daya manusia yang memadai, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan

ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat dalam pelaporan keuangan dalam suatu organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil temuan, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka di bawah ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM (X1) berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) (studi pada SKPD di Kota Mataram).
2. Pengendalian intern akuntansi (X2) tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) (studi pada SKPD di Kota Mataram).
3. Pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y) (Studi pada SKPD di Kota Mataram).

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan diuraikan beberapa saran yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. SKPD Kota Mataram sebaiknya menerapkan pengendalian intern akuntansi dengan maksimal. Dengan diterapkan pengendalian intern akuntansi, maka sistem dan prosedur akuntansi, Otorisasi, Formulir, dokumen dan catatan pemisahan tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti berikutnya, terutama yang ingin meneliti tentang bidang akuntansi sektor publik, sehingga disarankan untuk penelitian mendatang sebaiknya menambahkan variabel lainnya, misalnya variabel keterandalan dan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel moderating.
3. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji masalah kapasitas SDM, pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan obyek yang berbeda dan lebih luas, misalnya SKPD seluruh pulau Lombok

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik.* *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. 05 (02):18-30
- Andriani Wiwik. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan).* Polteknik Negeri Padang
- Ariesta Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat).* Tesis. Universitas Negeri Padang
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards of Internal Control in New York State Government.* www.osc.state.ny.us
- Indriasari, Desi dan Nahartyo, Ertambang, 2008, Pengaruh Kapsitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pmerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir), Disampaikan pada SNA Pontianak.

- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Riasetiawan, Mardhani. 2010. *Tinjauan Teoritis Sisten Informasi Akuntansi*.www.google.com. Akses 12 Januari 2010.
- Roshanti Arina, Edy Sujana, Kadek Sirnawati. 2014. *Pengaruh Kualitas Sdm, Pemanfaatan Ti, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Vol. 1. Univ Pendidikan Ganesha.
- Sembiring Febriady L. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)* Tesis. Universitas Negeri Padang
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc. New York.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval,, dan Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information System: Essential Concepts and Application*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Winidyaningrum, Celviana. 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten)*. Tesis. UNS